

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian terdahulu

Penelitian tentang manajemen laba melalui *discretionary accruals* sebagai respon perubahan tarif pajak penghasilan badan telah banyak dilakukan oleh para peneliti diantaranya adalah : Wenty (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis tingkat discretionary accruals sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak badan 2008”. Dimana peneliti menggunakan sampel laporan keuangan tahun 2008 – 2009 dimana terjadi perubahan tarif pajak progresif. Hasil dari penelitian ini bahwa hipotesis alternatifnya di tolak karena dimungkinkan perubahan tarif pajak yang kecil tidak di respon oleh perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan penghematan laba melalui accrual sebagai tindakan manajemen laba.

Subagyo dan Oktavia (2010) dalam penelitian yang berjudul “manajemen laba sebagai respon atas perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia” Peneliti menguji tentang pengaruh publikasi laporan arus kas terhadap volume perdagangan saham. Dimana peneliti menggunakan sample perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2006 sampai 2009 tapi hanya menggunakan sampel dari tahun 2008 dan 2009. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive

sampling dan emiten yang terpilih sebanyak 160 perusahaan dengan profit firm dan 89 perusahaan dengan lost firm. Dengan membandingkan laba tahun 2008 dan 2009 apakah terjadi manajemen laba dengan mengukur variabel insentif pajak dan insentif non pajak serta kepemilikan manajerial sebagai ukuran manajemen laba. Hasil penelitian bahwa perusahaan Manufaktur yang melakukan manajemen laba dalam merespon perubahan Tarif Pajak Badan di Indonesia adalah Perusahaan yang memperoleh Laba (profit firm) sedangkan perusahaan yang mengalami kerugian (lost firm) tidak akan merespon perubahan tarif pajak badan di indonesia dengan melakukan manajemen laba. Ditemukan pula bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dengan profit firm di pengaruhi oleh insentif pajak dan non pajak sedangkan perusahaan yang mengalami kerugian hanya dipengaruhi oleh insentif non pajak saja.

Husni (2010) melakukan penelitian serupa dalam penelitiannya husni ingin menguji apakah dengan dikeluarkannya UU perpajakan tahun 2008 yang efektif per januari 2009 manajer akan berusaha menunda pengakuan laba suatu periode sebelum dikeluarkannya tarif baru yg lebih rendah. Hasilnya, penelitian belum menemukan bahwa manajer merekayasa dengan adanya perubahan pajak penghasilan 2008

Wulandari,dkk (2004) dengan penelitiannya yang berjudul “Indikasi Manajemen Laba Menjelang Undang-Undang Perpajakan 2000 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta”. Penelitian ini yang bertujuan untuk Menemukan bukti empiris adanya praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan menjelang Undang-Undang Perpajakan 2000. Hasil dari penelitian ini

menyatakan bahwa *Discretionary accrual* periode setelah perubahan undang-undang lebih tinggi daripada periode sebelumnya.

Yin, Cheng (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “earning manajemen of profit firms and lost firm in response to tax rate reduction” hasilnya menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang labanya telah mencapai target penurunan laba dilakukan dengan earning pressure. Jika laba yang di capai telah melebihi target tahun berjalan maka manajer tertarik untuk menurunkan accruals yaitu dengan income smoothing. bahwa perusahaan yang mendapat laba lebih tertarik untuk mengurangi *discretionary accruals* untuk mendapatkan keuntungan perpajakan.

Hidayati dan Zulaikha (2003) dalam penelitian yang berjudul “Analisis perilaku earning manajemen : motivasi minimalisasi income tax” Menguji apakah dengan adanya perubahan UU Pajak Penghasilan tahun 2000 direspon oleh wajib pajak untuk melakukan *earning management* guna meminimalkan beban pajak penghasilan melalui rekayasa *discretionary accrual*, serta menguji apakah ada perbedaan *discretionary accrual* sebelum dan sesudah diberlakukannya UU PPh tahun 2000. Hasil penelitian tersebut bahwa Perubahan Undang-Undang Perpajakan khususnya Pajak Penghasilan tahun 2000 tidak direspon oleh Wajib Pajak Badan untuk melakukan *earning Management* melalui rekayasa *discretionary accrual* dengan motivasi untuk meminimumkan beban pajak penghasilan perusahaan.

2.2. Landasan Teori

Sebagai landasan dalam perumusan hipotesis dan analisis dalam penelitian ini, selanjutnya dikemukakan tinjauan teoritis mengenai manajemen laba melalui discretionary accruals sebagai respon atas perubahan tarif pajak :

2.2.1 Akruai

Terdapat dua jenis basis pencatatan yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Menurut akuntansi basis kas, pendapatan dicatat hanya pada saat kas diterima dan beban dicatat pada saat kas dikeluarkan. Sedangkan pada akuntansi berbasis akrual, transaksi-transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan perusahaan dicatat pada periode di mana transaksi tersebut terjadi bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Informasi yang disajikan pada basis akrual mengungkapkan hubungan yang mungkin penting dalam memprediksi masa depan sehingga dapat lebih bermanfaat untuk tujuan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, basis akrual yang banyak dipakai dan sesuai dengan prinsip akuntansi.

Satwika dan Damayanti (2005) menyatakan bahwa akrual merupakan jumlah penyesuaian akuntansi yang dibutuhkan untuk mengubah arus kas operasi menjadi laba bersih. Akruai kemudian dibagi menjadi dua jenis, antara lain :

1. *Nondiscretionary Accrual (Normal Accruals)* yaitu pengakuan akrual yang wajar dan tunduk pada saat standar atau peraturan akuntansi yang berlaku umum.
2. *Discretionary Accrual (Abnormal Accruals)* yaitu pengakuan akrual yang bebas, tidak diatur, dan merupakan pilihan kebijakan manajemen.

Perusahaan di dalam hal pengakuan pendapatan dan beban, Manajemen perusahaan kemudian dapat melakukan manipulasi dengan menggunakan *discretionary accrual*. Pendapat lain yang dinyatakan oleh Sulistyanto (2008) menyatakan bahwa *discretionary accrual* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Terdapat beberapa metode yang bisa dipakai manajer perusahaan untuk merekayasa besar kecilnya *discretionary accrual* ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya., misalkan kebebasan menentukan estimasi dan memilih metode depresiasi aktiva tetap, menentukan estimasi prosentase jumlah piutang tak tertagih, memilih metode penentuan jumlah persediaan, dan sebagainya. Sementara itu, Sulistyanto (2008) juga menyatakan bahwa pengertian *non-discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar yang diterima secara umum, misalkan metode depresiasi dan penentuan persediaan yang dipilih harus mengikuti metode yang diakui dalam prinsip akuntansi.

2.2.2 Manajemen Laba

2.2.2.1. Pengertian Manajemen Laba

Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas dalam jangka panjang.

Healy dan Wahlen (1999) dalam Sutrisno (2002:164) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan membentuk transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk memanipulasi besaran laba kepada *stakeholders* tentang kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Sugiri (1998) dalam Widyaningdyah (2001:92) membagi manajemen laba dalam dua definisi : (a) dalam arti sempit, manajemen laba sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya *earnings*, (b) dalam arti luas, manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (menurunkan) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit, dimana manajer bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

2.2.2.2. Model Manajemen Laba

Perbedaan pemahaman terhadap manajemen laba mendorong semakin berkembangnya model empiris yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas rekayasa manajerial ini. Secara umum ada 3 kelompok model empiris manajemen laba yang diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran yang digunakan, yaitu (Sulistyanto, 2008) :

- a. Model berbasis akrual merupakan model yang menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Model manajemen laba ini dikembangkan oleh Healy (1985), De Angelo (1986), Jones (1991), serta Dechow, Sloan dan Sweeney (1995).

- b. Model yang berbasis *specific accruals*, yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu pula. Model ini dikembangkan oleh Mc Nichols dan Wilson (1988) Petroni (1992), Beaver dan Engel (1996), Beneish (1997), serta Beaver dan Mc Nichols (1998).
- c. Model *distribution of earnings* dikembangkan oleh Burgatler dan Dichey (1997), Degeorge, Patel, dan Zechauer (1999), serta Myers dan Skinner (1999).

2.2.2.3 Sasaran Manajemen Laba

Menurut Ayres (1994;27-29) dalam Ma'ruf (2006) terdapat unsur-unsur laporan keuangan yang dapat dijadikan sasaran untuk dilakukan manajemen laba yaitu :

1) Kebijakan Akuntansi

Keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan oleh suatu perusahaan, yaitu antara menerapkan akuntansi lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijakan tersebut.

2) Pendapatan

Dengan mempercepat atau menunda pengakuan akan pendapatan.

3) Biaya

Menganggap sebagai ongkos (beban biaya) atau menganggap sebagai suatu tambahan investasi atas suatu biaya (*amortize or capitalize of investment*).

2.2.2.4 Teknik Manajemen Laba

Teknik manajemen laba menurut Setiawati dan Na'im (2000) dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgement* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi biaya garansi, amortisasi aktiva tak berwujud, dan lain-lain.

2. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi.

contoh: merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan, antara lain: mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

2.2.2.5 Motivasi Manajemen Laba

Beberapa hal yang memotivasi seorang manajer untuk melakukan manajemen laba antara lain (1) *bonus scheme*, (2) *debt covenant*, (3) *political motivation*, (4) *taxation motivation*, (5) pergantian CEO, dan (6) *initial public offering* (Scott, 2000:352)

1. Alasan bonus (*bonus scheme*)

Adanya asimetri informasi mengenai keuangan perusahaan menyebabkan pihak manajemen dapat mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka.

2. Kontrak utang jangka panjang (*debt covenant*)

Semakin dekat perusahaan kepada kreditur, maka manajemen akan cenderung memilih prosedur yang dapat “memindahkan” laba periode mendatang ke periode berjalan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan dalam pelunasan utang.

3. Motivasi politik (*political motivation*)

Perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak akan cenderung menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya, misalnya dengan menggunakan praktik atau prosedur akuntansi, khususnya selama periode dengan tingkat kemakmuran yang tinggi.

4. Motivasi pajak (*taxation motivation*)

Salah satu insentif yang dapat memicu manajer untuk melakukan rekayasa laba adalah untuk meminimalkan pajak atau total pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

5. Pergantian CEO (*chief executive officer*)

Banyak motivasi yang muncul saat terjadi pergantian CEO. Salah satunya adalah pemaksimalan laba untuk meningkatkan bonus pada saat CEO mendekati masa pensiun.

6. IPO (*initial public offering*)

Perusahaan yang baru pertama kali menawarkan harga pasar, sehingga terdapat masalah bagaimana menetapkan nilai saham yang ditawarkan. Oleh karena itu, informasi laba bersih dapat digunakan sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan, sehingga manajemen perusahaan yang akan *go public* cenderung melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga lebih tinggi atas saham yang akan dijualnya

2.2.2.6 Faktor – faktor Manajemen Laba

Menurut Scott (dalam Indriyani, 2009) pola manajemen laba dapat dilakukan dengan cara:

a. *Taking a bath*

Pola ini terjadi selama periode pada saat terjadinya reorganisasi seperti adanya pergantian CEO baru. Jika manajer merasa harus melaporkan kerugian maka ia akan melaporkan dalam jumlah yang besar. Dengan tindakan ini, manajer berharap dapat meningkatkan laba yang akan datang dan kesalahan atas kerugian perusahaan dapat dilimpahkan kepada manajer lama.

b. *Income minimization*

Perusahaan akan meminimumkan laba pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapatkan perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebanan pengeluaran iklan serta riset dan pengembangan yang cepat.

c. *Income maximization*

Manajer kemungkinan memaksimalkan laba bersih yang dilaporkan untuk tujuan bonus. Perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian utang mungkin juga akan memaksimalkan pendapatan dengan tujuan agar kreditur masih memberikan kepercayaan pada perusahaan tersebut.

d. *Income smoothing* (perataan laba)

Income smoothing merupakan sarana yang digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas urutan pelaporan penghasilan relatif terhadap beberapa urutan target yang terlibat karena adanya manipulasi variabel-variabel transaksi riil.

2.2.3 Pengukuran manajemen laba dengan Pendekatan discretionary Accruals

Dechow et. Al (1995) telah mengevaluasi beberapa model untuk mendeteksi dan mengukur manajemen laba berdasarkan akrual. Dari beberapa model perhitungan tersebut, peneliti menggunakan model Jones yang telah dimodifikasi. Model Jones dimodifikasi oleh Dechow, Sloan dan Sweeney (1995) dirancang untuk mengurangi kecenderungan terjadinya kesalahan model Jones, ketika *discretionary accrual* diterapkan pada pendapatan. Perubahan pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang, karena dalam pendapatan atas penjualan sudah tentu ada yang berasal dari penjualan secara kredit. Pengurangan terhadap nilai piutang untuk menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima benar-benar merupakan pendapatan bersih (Dechow et.al, 1995).

Seperti yang dilakukan Jones (1991), perhitungan dilakukan dengan menghitung total laba akrual, kemudian memisahkan *nondiscretionary accrual* (tingkat laba akrual yang wajar) dan *discretionary accrual* (tingkat laba akrual yang tidak normal).

Earnings management diproksikan dengan menggunakan *discretionary accrual*. *Discretionary accrual* adalah pengakuan akrual laba yang bebas, tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. Dalam penelitian ini untuk mengurangi besarnya *discretionary accrual* dihitung dengan menggunakan model Kasznik (1999) (Pertiwi, 2010). Dari perbandingan *adjusted R²* diketahui bahwa model Kasznik (1999) mempunyai rata-rata *adjusted R²* yang paling tinggi

dibanding ketiga model lainnya. *Discretionary accrual* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$TAit = NIT - CFO \dots\dots\dots(1)$$

$$TAit = NDAit + DAit \dots\dots\dots(2)$$

Nilai total akrual diestimasi dengan menggunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$TAit / Ait-1 = \alpha_0 (1/Ait-1) + \beta_1 ([\Delta REVit - \Delta RECit] / Ait-1) + (\beta_2 PPEit / Ait-1) + e_{it} \dots\dots(3)$$

Lalu dengan menggunakan koefisien tersebut (α , β_1 , β_2) nilai *non discretionary accrual* dihitung dengan rumus:

$$NDAit = \alpha_0 (1/Ait-1) + \beta_1 ([\Delta REVit - \Delta RECit] / Ait-1) + \beta_2 (PPEit / Ait-1) \dots\dots\dots(4)$$

Kemudian nilai *discretionary accrual* dapat dicari dengan mengurangi *total accrual* dengan nilai *non-discretionary accrual*.

$$DA_{it} = \left(\frac{TA_{it}}{A_{t-1}} \right) - NDA_{it}$$

Dimana:

TA = *Total accrual*

NIT = Laba bersih

CFO = Arus kas dari kegiatan operasi

NDA = *Non discretionary accrual*

DA = *Discretionary accrual*

ΔREV = Perubahan pendapatan dari tahun t-1 ke tahun t ($REV_t - REV_{t-1}$)

ΔREC = Perubahan nilai bersih piutang dari tahun t-1 ke tahun t ($REC_t - REC_{t-1}$)

PPE = Nilai kotor aktiva tetap pada tahun t

A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

$\alpha^1, \beta_1^1, \beta_2^1$: *Fitted coefisient* yang diperoleh dari hasil regresi.

2.2.4 Undang-Undang tarif pajak

Pada tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia menerbitkan kembali undang-undang yang merevisi Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada tahun 2009. Penelitian ini hanya menyoroti mengenai perubahan tarif pajak Badan di Indonesia saja, karena sejak diterbitkannya UU ini terjadi perubahan tarif pajak badan yang cukup signifikan. Dengan diberlakukannya tarif pajak yang baru ini, perusahaan khususnya yang telah *go public* akan sangat diuntungkan. Jika pihak

manajemen perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajak, maka perubahan tarif ini akan memberikan insentif bagi manajer untuk menurunkan laba perusahaan pada tahun sebelum diefektifkannya perubahan tarif pajak tersebut. Menurut UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, perubahan tarif pajak Badan di Indonesia akan dilakukan sebanyak dua kali, yaitu: 28% pada tahun 2009, dan 25% pada tahun 2010. Dan 5% lebih rendah dari tarif untuk perusahaan yang telah *go public* dan minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut UU No. 36 tahun 2008 Pasal 17 tentang pajak penghasilan, perubahan tarif pajak badan di Indonesia akan dilakukan sebanyak dua kali, yaitu: 28% pada tahun 2009, dan 25% pada tahun 2010. Sehingga kemungkinan besar perusahaan akan melakukan manajemen laba pada tahun sebelum diberlakukannya tarif pajak tersebut, yaitu tahun 2008 dan tahun 2009.

2.3.Hipotesis

2.3.1 Manajemen Laba sebagai Respon perubahan Tarif Pajak

Yin dan Cheng (2004) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka merespon perubahan tarif pajak. Mereka menguji pengaruh dari insentif pajak dan insentif non pajak terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka merespon perubahan tarif pajak di Amerika Serikat. Yin dan Cheng (2004) menggunakan pendekatan *discretionary current accrual* dalam mendeteksi manajemen laba, tetapi penelitian ini menggunakan *discretionary accrual*. Hal ini dikarenakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan tidak cukup hanya

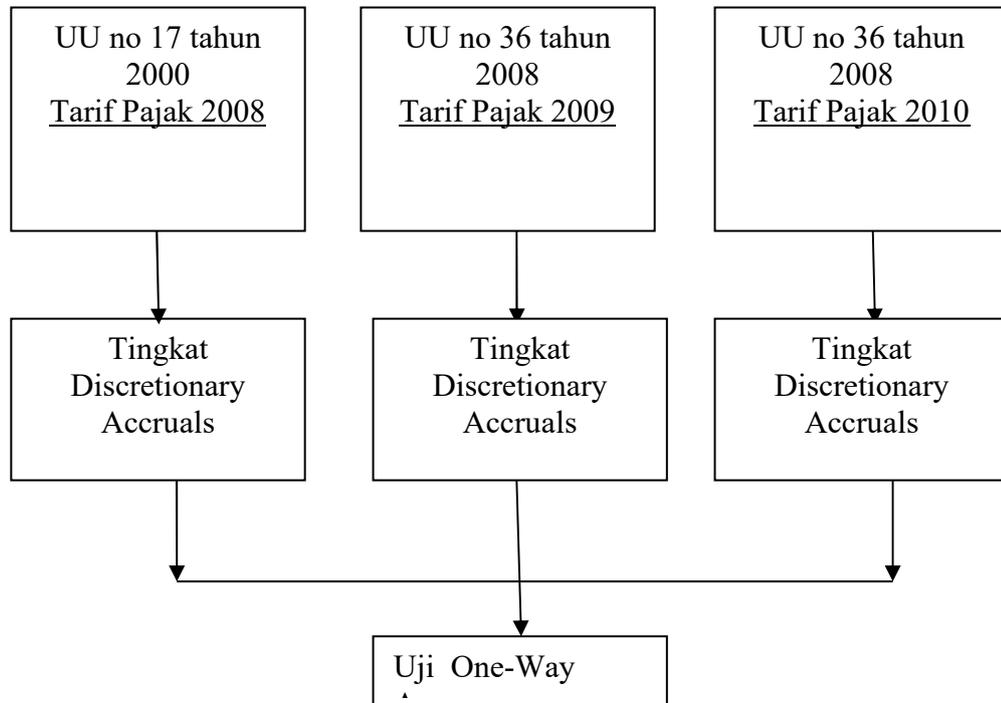
dideteksi melalui *discretionary current accrual*, mengingat adanya *accrual* yang berasal dari *non-current accrual* yang harus diperhitungkan, contohnya: penyusutan aktiva tetap.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Zulaikha (2004) menguji apakah perubahan tarif pajak penghasilan dan lapisan penghasilan kena pajak dalam undang-undang tahun 2000 yang diefektifkan pada tahun 2001 direspon oleh manajemen dengan melakukan manajemen laba. Setiawati (2001), serta Hidayati dan Zulaikha (2004) menggunakan pendekatan *discretionary accrual* dalam mendeteksi adanya manajemen laba. Hasil dari penelitian Setiawati (2001) maupun Hidayati dan Zulaikha (2004) tidak berhasil membuktikan adanya manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak penghasilan di Indonesia.

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 no 17 Tentang Pajak Penghasilan, perubahan tarif pajak badan di Indonesia akan dilakukan sebanyak dua kali, yaitu: 28% pada tahun 2009, dan 25% pada tahun 2010. Sehingga kemungkinan besar perusahaan akan melakukan manajemen laba pada tahun sebelum diberlakukannya tarif pajak tersebut, yaitu tahun 2008, 2009 dan tahun 2010. Oleh karena itulah, dikembangkan hipotesis berikut ini :

H1: terdapat perbedaan tingkat *discretionary accruals* dalam merespon perubahan Tarif Pajak penghasilan Badan

2.4. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1

Kerangka Konsptual

Keterangan :

a. Tarif pajak tahun 2008 sesuai dengan Undang – Undang no 17 tahun 2000 yang berlaku tahun 2001 bahwa tarif pajak yang berlaku adalah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PKP s/d 50.000.000 = 10%
2. PKP 50.000.000 s/d 100.000.000 = 15%
3. PKP di atas 100.000.000 = 30%

- b. Tarif Pajak tahun 2009 sesuai dengan Undang – Undang no 36 tahun 2008 yang berlaku tahun 2009 adalah 28%.
- c. Tarif Pajak tahun 2010 sesuai dengan Undang – Undang no 36 tahun 2008 yang berlaku tahun 2010 adalah 25%. Tarif PPh Badan ini masih dapat dikurangi lagi sebesar 5% apabila Wajib Pajak Badan tersebut merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak. Perusahaan sebagai Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Dengan ketentuan Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bagian bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Dengan ketentuan tarif yang berbeda dari tahun 2008, 2009 dan 2010 maka peneliti mengindikasikan bahwa manajemen laba dalam perusahaan melalui *discretionary accruals* terjadi pada tahun 2010 dengan penurunan tarif pajak sampai 3% yang bisa digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya.